

## **Analisis Perkembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Sebagai Daerah Otonomi**

### *Analysis of the Development of Regional Original Income of Banggai Islands Regency as an Autonomous Region*

<sup>1</sup>Liswan Rusman\*, <sup>2</sup>Umar, Cahyaning Raheni<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Tompotika Luwuk Banggai, Indonesia

<sup>2,3</sup>Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

(\*)Email Korespondensi: [adeliswan1206@gmail.com](mailto:adeliswan1206@gmail.com)

#### **Abstrak**

Analisis Perkembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Sebagai Daerah Otonomi". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan potensi PAD Kabupaten Banggai Kepulauan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Data yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran (LRA) tahun anggaran 2018-2021 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang diperoleh melalui <https://banggaikep.go.id/portal/>. Metode analisis deskriptif kualitatif, menggunakan pendekatan analisis tipologi kelas dan analisis proyeksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan PAD Kabupaten Banggai Kepulauan dari analisis tipologi kelas dan analisis proyeksi tidak ada perbedaan yaitu secara umum perkembangan potensi PAD Banggai Kepulauan menunjukkan perkembangan yang terbatas, dari 9 jenis pajak daerah dan 15 jenis retribusi daerah yang dipungut yaitu pajak hotel dan retribusi pelayanan kesehatan yang memberikan kontribusi terbesar.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Analisis Trend, Tipologi Kelas

#### **Abstract**

*Analysis of the Development of Original Regional Income Potential of Banggai Islands Regency as an Autonomous Region". The aim of this research is to determine the development of the PAD potential of Banggai Islands Regency from the regional tax and regional levy sectors. The data used is the budget realization report (LRA) for the 2018-2021 fiscal year at the Banggai Islands Regency Regional Revenue Agency obtained via <https://banggaikep.go.id/portal/>. Qualitative descriptive analysis method, using a class typology analysis approach and projection analysis. The results of the research show that there is no difference in the development of Banggai Islands Regency PAD from the class typology analysis and projection analysis, namely that in general the potential development of Banggai Islands PAD shows limited development, of the 9 types of regional taxes and 15 types of regional levies collected, namely hotel tax and service levy. health makes the biggest contribution.*

**Keywords:** Regional Taxes, Regional Levies, Regional Original Income (PAD)

#### **PENDAHULUAN**

Desentralisasi lebih dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota, karena merupakan ujung tombak pembangunan yang lebih mengetahui permasalahan di daerah. sehingga daerah kabupaten/kota diberi wewenang yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional dalam rangka mendorong daerah kabupaten/kota mampu mengakselerasi potensi lokal menjadi sumber pendapatan daerah. Kabupaten/kota

lebih didorong meningkatkan PAD sebagai tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah.

Tak dapat dihindari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu menjadi parameter kemampuan yang digunakan secara umum terhadap suatu daerah otonomi, semakin tinggi PAD suatu daerah, menunjukkan bahwa daerah tersebut akan mudah melaksanakan pembangunan dari aspek penyelenggaraan otonomi daerah yang diberikan.

Christianingrum, R., & Aida, A. N. (2021), menyatakan bahwa Penyelenggaraan otonomi daerah sangat bergantung pada peningkatan PAD. Semakin besar PAD suatu daerah, semakin besar kemampuan daerah tersebut untuk berkembang secara mandiri dan mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat. PAD adalah salah satu modal dasar pemerintah daerah untuk mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Penerimaan PAD yang rendah dapat menunjukkan betapa bergantungnya pemerintah daerah pada pusat untuk pembiayaan pembangunan.

Christianingrum, R., & Aida, A. N. (2021), melalui data Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK) menunjukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 1999–2019, rata-rata terdiri dari PAD sebesar 25,66 persen, Dana Perimbangan sebesar 58,54 persen, dan Pendapatan Lainnya sebesar 15,81 persen, Ini membuktikan bahwa kemampuan daerah masih rendah selama hampir 22 (dua puluh dua) tahun terakhir. Lebih dari setengah pendapatan daerah berasal dari transfer pusat (Dana Perimbangan), yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kondisi ketergantungan daerah terhadap pusat masih cukup besar.

Jika dicermati secara umum, perkembangan penerimaan PAD pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota masih relatif rendah sehingga cenderung tergantung dengan pendapatan dari pemerintah pusat. Padahal kemampuan melaksanakan otonomi daerah salah satunya di ukur dari penerimaan PAD. Kemampuan keuangan daerah untuk membiayai operasi pemerintahan daerahnya adalah salah satu ciri utama kemampuan daerah untuk menerapkan otonomi daerah. Dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang semakin mengecil, diharapkan PAD akan memainkan peran terbesar dalam menggerakkan dana untuk operasi pemerintah daerah. (Kamaroellah, R.A, 2017).

Tahun 1999-2023, selama hampir 24 tahun Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi daerah otonom, selama kurun waktu tersebut, tentu secara normatif dan empiris kondisi dan keadaan sebagai daerah otonomi telah berdampak positif terhadap perkembangan peningkatan PAD.

Berdasarkan data Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKD) dari Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 – 2021, menunjukkan bahwa rata-rata komposisi PAD sebesar 3,36%, Dana perimbangan 94,27% dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar 2,37% dari total penerimaan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Masih rendahnya PAD Banggai Kepulauan, tentu ada fenomena yang perlu dianalisis, secara objektif, sesuai dengan fakta dan kondisi yang terjadi. Olehnya, penelitian ini dilakukan ingin mengetahui perkembangan potensi sumber-sumber PAD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan pendekatan analisis potensi yang diukur dengan pendekatan tipologi klassen dan pendekatan proyeksi.

## METODE

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dan dikumpulkan langsung dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Pemerintah Banggai Kepulauan melalui data Realisasi Pendapatan Daerah dan data sekunder diperoleh dan dikumpulkan melalui dokumen-dokumen perencanaan daerah, telaah pustaka, literatur dan laporan-laporan lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

## HASIL

### 1. Realisasi Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kab. Banggai Kepulauan

**Tabel 1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 – 2021**

No		2018	2019	2020	2021
<b>I</b>	<b>PAD</b>	<b>23.922.233.075.54</b>	<b>34.231.612.395.00</b>	<b>36.213.331.404.27</b>	<b>28.653.645.935.34</b>
1	Pajak daerah	5.632.812.335.50	6.940.777.172.80	4.800.752.408.75	5.630.410.617.25
2	Retribusi daerah	8.267.732.595.00	14.740.563.898.00	19.998.042.156.00	16.216.053.738.00
3	Hasil Pengelolaan Keuangan daerah Yang Dipisahkan	1.155.602.301.00	1.319.993.123.00	1.703.694.094.00	2.588.375.499.55
4	Lain-lain PAD yang Sah	8.866.085.844.04	11.230.278.201.20	9.710.842.745.52	4.218.806.080.54
<b>II</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>658.206.305.626.00</b>	<b>714.364.855.849.00</b>	<b>627.257.913.024.00</b>	<b>780.429.409.234.00</b>
1	Bagi Hasil Pajak	7.222.509.411.00	6.809.133.872.00	6.884.504.128.00	23.097.351.306.00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	20.904.492.042.00	14.358.493.021.00	30.879.389.856.00	56.044.929.192.00
3	Dana Alokasi Umum	465.346.799.000.00	490.735.851.000.00	444.960.480.000.00	440.660.646.000.00
4	Dana Alokasi Khusus	164.512.996.173.00	202.258.105.415.00	144.504.837.141.00	169.633.885.042.00
<b>III</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>137.055.881.407.00</b>	<b>162.292.300.614.00</b>	<b>163.680.559.790.00</b>	<b>20.215.589.000.00</b>
1	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	19.739.520.000.00	13.349.402.000.00		
2	Dana Hibah Dana BOS	18.773.520.000.00	16.947.760.000.00	27.899.800.000.00	20.215.589.000.00
3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov & Pemda Lainnya	17.887.551.407.00	18.682.397.614.00	19.635.590.790.00	
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	99.213.710.000.00	113.132.741.000.00	114.114.949.000.00	
5	Bantuan Keuangan dari Provinsi & Pemda Lainnya	215.100.000.00	180.000.000.00	2.030.220.000.00	
<b>TOTAL</b>		<b>819.184.420.108.54</b>	<b>910.888.768.858.00</b>	<b>827.151.804.218.27</b>	<b>852.395.995.475.34</b>

Sumber : Bapenda Bangkep 2022, Data diolah

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa perkembangan PAD Banggai Kepulauan dari tahun 2018-2021 mengalami naik turun. Pada tahun 2018 sebesar Rp. 23.922.233.075.54, tahun 2019 ada peningkatan sebesar Rp. 10.309.379.320 menjadi Rp. 34.231.612.395.00. tahun 2020 terjadi peningkatan kembali sebesar Rp. 36.213.331.404.27, sebaliknya tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp. 28.653.645.935.34, karena disebabkan penurunan sumber penerimaan dari sektor retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Secara umum perkembangan PAD Banggai Kepulauan jika dicermati menunjukkan bahwa dana perimbangan masih memiliki komposisi yang paling mendominasi yaitu sebesar Rp 780.429.409.234 atau 94,27% dalam komposisi pendapatan daerah, sedangkan PAD sebesar 3,36% dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar 2,37%.

### 2. Perkembangan Realisasi Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 – 2021

Jika melihat perkembangan penerimaan PAD dari dua sektor yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, membuktikan bahwa penerimaan retribusi yang cukup besar. Adapun jenis-jenis retribusi daerah jika dicermati dari tahun 2018-2021 diantaranya adalah Retribusi Pelayanan kesehatan berkontribusi paling besar yaitu Rp 13.738.830.900 yang meliputi pelayanan rawat inap, pelayanan pemeriksaan radiologi, pelayanan pengguna mobil ambulance pelayanan rawat jalan, pelayanan apotek dan farmasi. Kemudian diikuti oleh retribusi Pelayanan kesehatan (Dinkes/Puskesmas), Retribusi (IMB), Ret.Pelayanan persampahan, Ret.Pelayanan parkir tepi jalan Umum, Retribusi Pemakaian kekayaan daerah (alat Berat) dan retribusi lain-lain. Sedangkan dari

aspek penerimaan pajak daerah, dari tahun 2018-2021, pajak penerangan jalan yang mengalami peningkatan setiap tahun. Walaupun kontribusi terhadap PAD relatif lebih kecil jika dibandingkan penerimaan dari pajak hotel yang paling besar kontribusinya terhadap PAD. Yang paling rendah kontribusi terhadap PAD adalah pajak

hiburan, sedangkan jenis pajak lainnya mengalami fluktuasi.

### **Perkembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2021**

#### **1. Analisis Tipologi kelas Pajak Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan**

**Tabel 2. Tipologi kelas Pajak Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2021**

No	Jenis Pajak	2018	2019	2020	2021
1	Pajak Hotel	Potensial	Potensial	Prima	Prima
2	Pajak Restoran	Berkembang	Tidak Berkembang	Tidak Potensial	Tidak Potensial
3	Pajak Reklame	Berkembang	Berkembang	Tidak Potensial	Tidak Potensial
4	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	Potensial	Potensial	Potensial	Tidak potensial
5	Pajak Penerangan Jalan	Potensial	Tidak potensial	Prima	Tidak potensial
6	Pajak Air Tanah	Berkembang	Berkembang	Tidak potensial	Tidak potensial
7	PBB P2	Prima	Berkembang	Tidak potensial	Tidak potensial
8	BPHTB	Prima	Berkembang	Tidak potensial	Tidak potensial
9	Pajak Hiburan	Prima	Berkembang	Tidak potensial	Tidak potensial

Sumber : Data diolah, 2022

Pajak hotel di tahun 2018-2019 termasuk dalam posisi potensial, kemudian pada tahun 2020-2021 menjadi prima. Pajak restoran di tahun 2018 termasuk dalam posisi berkembang, berubah menjadi tidak berkembang di tahun 2019, kemudian di tahun 2020-2021 berubah menjadi tidak potensial. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun 2018-2020 termasuk dalam posisi potensial, sedangkan di tahun 2021 menjadi tidak potensial. Pajak Penerangan Jalan di tahun 2018 dan 2020 kategori potensial dan prima, berada pada kategori tidak potensial pada tahun 2019 dan tahun 2021. Pajak Air Tanah pada tahun 2018-2019 termasuk kategori berkembang, dan 2 selanjutnya berubah menjadi tidak potensial. PBB P2, BPHTB, Pajak Hiburan tahun 2018-2019 termasuk kategori prima dan berkembang, sedangkan di tahun 2020-2021 berubah menjadi tidak potensial.

#### **2. Analisis Tipologi Kelas Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan**

Perkembangan potensi jenis Retribusi Daerah, seperti Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinkes/Puskesmas) berada dalam kategori prima, sedangkan Retribusi Pelayanan Kesehatan (RST) berada dalam kategori potensial. Oleh karena itu, kedua jenis retribusi ini dapat diandalkan sebagai sumber Penerimaan PAD Kabupaten Banggai Kepulauan. Untuk saat ini, retribusi seperti Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Penyeberangan Air, Retribusi Ijin

Trayek, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Usaha Perikanan, Retribusi Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, Retribusi Pelayanan Pasar, dan Retribusi Rumah Potong Hewan semuanya berada dalam kategori yang sedang berkembang, sehingga sangat perlu untuk dilanjutkan pemungutannya karena potensinya masih dapat dikembangkan.

### **Perkembangan PAD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Analisis Makro**

#### **1. Analisis Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan**

**Tabel 3. Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018-2021**

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Reklame	PMBLB
2018	3.922.233.075.54	614.649.930.00	16.307.275.00	1.884.409.743.00
2019	4.231.612.395.00	1.391.735.588.50	46.312.621.75	2.184.648.450.55
2020	6.213.331.404.27	698.519.197.00	36.625.448.25	751.776.510.50
2021	8.653.645.935.34	795.077.120.00	90.528.786.55	816.175.998.00
Total	<b>23.020.822.810.20</b>	<b>3.499.981.835.50</b>	<b>189.774.131.55</b>	<b>5.637.010.702.05</b>

Sumber : Data Diolah, 2022

**Tabel 4. Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018-2021**

Tahun	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Air Tanah	PBB P2	BPHTB	Pajak Hiburan
2018	1.897.027.074.00	1.320.000.00	1.041.051.663.50	42.203.450.00	385.000.00
2019	2.040.282.384.00	1.029.000.00	1.043.507.973.00	50.978.855.00	1.072.500.00
2020	2.163.066.838.00	1.587.500.00	929.510.116.00	107.135.020.00	200.000.00
2021	2.309.128.493.00	1.307.500.00	1.430.574.635.00	97.872.430.00	550.000.00
Total	<b>8.409.504.789.00</b>	<b>5.244.000.00</b>	<b>4.444.644.387.50</b>	<b>298.189.755.00</b>	<b>2.207.500.00</b>

Sumber : Data Diolah, 2022

Proyeksi perkembangan potensi PAD dari sektor pajak daerah, berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dari 9 jenis pajak yang dipungut di Banggai Kepulauan dari 2018–2021, jenis pajak hotel yang memiliki perkembangan terus meningkat dengan trend peningkatan Rp. 3.922.233.075,54 tahun 2018 naik sebesar Rp. 18.985.554.122,59 tahun 2022. Selanjutnya pajak penerangan jalan sebesar Rp. 8.409.504.789.00 dari Rp. 1.897.027.074,00 tahun 2018 naik menjadi sebesar Rp. 2.663.413.409,13 tahun 2021.

Sedangkan pajak restoran, PMBLB, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak air tanah, dan pajak hiburan menunjukkan perkembangan dengan kondisi yang fluktuasi dari tahun ke tahun. Sedangkan pajak reklame dan BPHTB memiliki perkembangan yang cenderung kecil dari kontribusinya terhadap PAD. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan, kondisi eksisting pemungutan pajak daerah perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan agar semua potensi pajak daerah dapat di

optimalkan penerimaan dan pemungutannya untuk sumber PAD Kabupaten Banggai Kepulauan saat ini dan kedepan

## 2. Analisis Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Proyeksi Perkembangan potensi retribusi daerah dari hasil analisis menunjukkan bahwa dari 15 jenis retribusi yang dipungut di Banggai Kepulauan, retribusi pelayanan kesehatan yang perkembangannya diproyeksi terus meningkat, kontribusinya sebesar Rp. dari Rp 6.523.882.118.00 naik menjadi Rp. 13.738.830.900.00. Sedangkan jenis retribusi lain, perkembangannya diproyeksikan memiliki kontribusi fluktuasi terhadap PAD selama 4 tahun terakhir. Kondisi demikian, sama seperti kondisi pajak daerah, bahwa kondisi eksisting pemungutan retribusi daerah perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan agar semua jenis retribusi daerah dapat pemungutannya untuk sumber PAD Kabupaten Banggai Kepulauan saat ini dan kedepan

## PEMBAHASAN

### Perkembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2021

Perkembangan potensi PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan kondisi eksisting yang terbatas pada jenis pajak dan retribusi daerah tertentu. Akibatnya, terlihat dari persentase penerimaan PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah sekitar 25 persen dari proporsi pendapatan daerah. Ini menunjukkan bahwa kondisi eksisting potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan belum optimal pemungutannya.

Dipilih sektor pajak daerah dan retribusi daerah untuk melihat perkembangan potensi PAD kabupaten Banggai Kepulauan 4 tahun terakhir, alasannya, 2 jenis PAD tersebut yang sangat memiliki peluang untuk di pungut karena karakteristiknya jelas. Ramadhani, A. K. (2019) menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang memiliki peluang untuk dipungut karena memiliki karakteristik kebijakan dan pelaksanaan yang jelas.

Sangat mendasar dijadikan ukuran untuk melihat perkembangan PAD Kabupaten Banggai Kepulauan. Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang paling dominan dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan potensi PAD. Berbagai penelitian diantaranya, Juliarini, A. (2020) yang menyatakan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting dalam mendukung peningkatan PAD.

Pendapat yang lain, Kusuma dan Wirawati, (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa hubungan antara penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan PAD sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD, dengan kontribusi pajak daerah yang paling dominan mempengaruhi peningkatan PAD.

Dari aspek regulasi, saat ini, selain UU No 28 Tahun 2009 pemerintah terus melakukan perubahan upaya agar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten /Kota menjadi sumber

PAD yang diharapkan menjadi andalan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Pasal 2 menyatakan bahwa pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendanaan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu, sejalan dengan semangat otonomi daerah sudah seharusnya penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi daerah dari waktu ke waktu harus ditingkatkan.

Setelah melakukan analisis untuk mengetahui perkembangan potensi PAD dari jenis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan Analisis tipologi klassen. Maka dapat diketahui yang termasuk dalam posisi prima, potensial, berkembang, dan terbelakang.

Pajak daerah dan retribusi daerah yang termasuk termasuk posisi Prima, artinya potensi pajak daerah dan retribusi daerah sangat layak untuk diteruskan pemungutannya karena memiliki potensi baik untuk dikembangkan karena pemerintah Daerah sudah baik dalam mengelola jenis pajak dan retribusi daerah tersebut dan merupakan sektor andalan bagi penerimaan PAD. Pajak daerah dan retribusi daerah yang termasuk kategori Potensial, artinya potensi sangat layak untuk diteruskan pemungutannya karena penerimaannya yang potensial untuk dikembangkan menjadi unggulan. Pajak daerah dan retribusi daerah termasuk posisi berkembang, artinya sangat layak untuk diteruskan pemungutannya karena potensinya masih dapat dikembangkan walaupun memiliki kontribusi terhadap PAD yang fluktuasi. Sedangkan pajak daerah dan retribusi daerah yang termasuk posisi terbelakang, artinya pajak daerah dan retribusi daerah tersebut perlu dipertimbangkan kembali untuk diteruskan pemungutannya karena perkembangan potensinya sangat kecil.

Selan itu, pajak daerah dan retribusi daerah yang termasuk prima, jika dilihat dari kontribusi dan pertumbuhannya selama 4 tahun terakhir cenderung memberikan kontribusi dan pertumbuhan yang positif dengan nilai besar dari 1 persen. Sedangkan

jenis pajak dan retribusi daerah termasuk dalam kategori potensial, perlu ada perhatian dan upaya secara serius dari pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pemungutan. Artinya bahwa pajak dan retribusi daerah tersebut berpeluang menjadi andalan pemerintah daerah karena memberikan kontribusi yang besar untuk PAD. Namun, karena pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan kontribusi dan pertumbuhan yang tidak stabil. Demikian juga, apabila jenis pajak dan retribusi daerah masuk dalam kategori berkembang, berarti bahwa tingkat kontribusi dan pertumbuhan jenis pajak dan retribusi daerah tersebut dapat menjadi andalan. Sementara itu, jika jenis pajak daerah dan retribusi daerah termasuk dalam kategori terbelakang, sebaiknya pemerintah daerah tidak perlu dipungut karena dari segi kontribusi dan pertumbuhan tidak memadai dan memerlukan perbaikan. Jangan sampai terkesan biaya lebih besar namun kontribusinya tidak berkualitas.

Sementara perkembangan potensi PAD dari analisis proyeksi bahwa jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang termasuk kategori prima dari analisis tipologi kelas juga yang memiliki proyeksi potensi perkembangan dengan trend peningkatan setiap tahun. Artinya, 2 pendekatan hasil analisis ini saling mendukung untuk membuktikan tidak ada perbedaan perspektif dalam melihat perkembangan potensi PAD Banggai Kepulauan. Sehingga dapat dikatakan perkembangan PAD Banggai Kepulauan saat ini masih terbatas pada jenis pajak daerah dan retribusi daerah tertentu. Hasil yang lain, dari total jenis pajak daerah

dan retribusi daerah yang sebenarnya lebih banyak yang termasuk kategori berkembang bahkan terbelakang memberikan gambaran umum bahwa penerimaan PAD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018-2021 mencerminkan ketimpangan kondisi yang sebenarnya dalam menjalankan otonomi daerah.

## KESIMPULAN

Perkembangan PAD Kabupaten Banggai Kepulauan dari analisis tipologi kelas dan analisis proyeksi menunjukkan adanya keterbatasan sumber penerimaan yang belum optimal karena dari sekian jumlah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, potensi pajak hotel yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak daerah, sedangkan potensi retribusi pelayanan kesehatan yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan retribusi daerah.

## SARAN

Saran untuk peneliti berikutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan komponen PAD yang lain, metode analisis yang berbeda dan perlu dipertimbangkan menganalisis faktor-faktor penyebab belum optimalnya penerimaan PAD dan data yang digunakan lebih dari 4 tahun. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu meningkatkan optimalisasi pungutan sumber-sumber PAD melalui upaya kebijakan yang strategis dan inovatif melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2020. Banggai kepulauan. Diperoleh dari <https://banggaikep.go.id/portal/>

Badan Pendapatan Daerah, 2021. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2021. Banggai kepulauan. Diperoleh dari <https://banggaikep.go.id/portal/>

Christianingrum, R., & Aida, A. N. (2021). Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan*

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pendapatan Daerah, 2018. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2018. Banggai kepulauan. Diperoleh dari <https://banggaikep.go.id/portal/>
- Badan Pendapatan Daerah, 2019. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2019. Banggai kepulauan. Diperoleh dari <https://banggaikep.go.id/portal/>
- Badan Pendapatan Daerah, 2020. Laporan

- Negara*, 6(1), 58-73.
- Juliarini, A. (2020). Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 13(2), 1-10
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 14(1), 123-138.
- Kusuma, M. K. A. A., & Wirawati, N. G. P. (2013). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD Sekabupaten/kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(3), 574-585.
- Ramadhani, A. K. (2019, Agustus). Analisis Pemetaan Elemen Pajak Daerah Kota Kediri Menggunakan Pendekatan Tipologi Klassen. In *Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial* (Vol. 1, No. 1).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
- Naskah Akademik Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022.